

Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur

Hehet Sumarhaeti

STISIP Guna Nusantara

Corresponding Author: hsumarhaeti65@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.715>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-01

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan SPBE di tingkat daerah. Meskipun kebijakan SPBE telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2024, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, serta rendahnya literasi digital masyarakat desa. Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones menunjukkan bahwa tiga dimensi utama—organisasi, interpretasi, dan aplikasi belum berjalan optimal. Dimensi organisasi terkendala oleh struktur kerja dan dukungan teknis yang belum memadai. Dimensi interpretasi menunjukkan kesenjangan pemahaman antara aparatur dan masyarakat. Sementara itu, dimensi aplikasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Untuk mewujudkan SPBE yang berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, serta strategi komunikasi dan sosialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Implementasi; Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang berlangsung sangat cepat telah ditandai oleh kemajuan teknologi yang semakin mempersempit jarak antara informasi dan kebutuhan manusia. Kecepatan dan ketepatan menjadi elemen krusial dalam interaksi antara pemerintah dan warga negara, namun tingginya mobilitas masyarakat belum sepenuhnya diimbangi oleh respons pelayanan publik yang memadai dari pemerintah (Nurul Siti Ambia Zahra et al., 2022)

Di era global saat ini, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sebagaimana terjadi di negara lain. Perkembangan teknologi dan akses internet menjadi pendorong utama era digital, yang turut mengubah pola komunikasi dan partisipasi publik. Kehadiran teknologi informasi memungkinkan masyarakat, termasuk warga Negara Indonesia, untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara lebih mudah melalui perangkat komputer maupun smartphone, sehingga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan dinamika digital yang terus berkembang. (Sindiana dan Rodiyah, 2023)

Pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin meluas memberikan dampak positif terhadap efektivitas komunikasi, penyebaran informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara digital. Dalam konteks ini, transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan, didorong oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan responsive. (Subhan & Sartika, 2025)

Lebih jauh, pemanfaatan TIK menunjukkan peran teknologi yang sangat penting untuk dikembangkan guna memudahkan akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Dengan perkembangan di bidang teknologi maka dapat terciptanya peningkatan terhadap taraf kesejahteraan pada masyarakat luas (Rusdy & Flambonita, 2023). Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan TIK demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, layanan yang cepat, akurat, efisien, dan akuntabel. Dalam menjawab tantangan tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Syafaat et al., 2025).

Selain itu, sistem pemerintah berbasis elektronik juga memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan platform elektronik, proses administrasi dapat dilakukan secara online, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan dokumen dan permohonan layanan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan, melacak status permohonan, dan menerima pemberitahuan secara online, menghemat waktu dan tenaga baik bagi pemerintah maupun masyarakat. (Choirunnisa et al., 2023)

Penetapan SPBE ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menegaskan perlunya seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi pelayanan publik serta administrasi pemerintahan secara digital. Implementasi SPBE diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat.

Kabupaten Cianjur salah satu daerah yang menetapkan Implementasi SPBE memperkuat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 79 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), n.d.). Adanya peraturan ini menjadi sebuah acuan atau pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE dilingkungan Kabupaten Cianjur. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di Kabupaten Cianjur. Selain itu, Peraturan Bupati ini juga menggantikan sejumlah regulasi sebelumnya agar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Cianjur menjadi lebih terpadu dan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara akurat kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong Lexy, 2017) bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan informasi tekstual yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan catatan lapangan. Menurut (John W. Creswell, 2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami variabel secara independen berdasarkan konteks actual.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Nazir, 2013), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Elektronik, 2018), SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government*. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Anggriani & Islami, 2021)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kabupaten dirancang untuk menyatukan berbagai proses pelayanan dan administrasi pemerintahan secara terpadu. Prinsip keterpaduan menjadi sangat penting untuk menghilangkan kesan birokrasi yang selama ini berjalan secara terpisah antar perangkat daerah. Melalui pendekatan ini, setiap instansi di lingkungan pemerintah kabupaten diarahkan untuk melakukan pelaporan dan pengelolaan sistem secara terintegrasi melalui satu jalur koordinasi yang konsisten.

Sebelum penerapan SPBE, banyak sistem informasi dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga tidak jarang terjadi ketimpangan dalam pengelolaan ada sistem yang berjalan baik, namun banyak pula yang terbengkalai. Ketidakterpaduan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan. SPBE hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan mendorong kesinambungan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola digital pemerintahan kabupaten.

Adanya SPBE membuat pelayanan birokrasi menjadi efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan penyederhanaan berbagai sistem sebelumnya yang berbelit-belit. Dengan begitu, berbagai macam keperluan daerah dapat dilaporkan dan dijalankan secepat mungkin. Akuntabilitas memiliki dasar pelaporan yang jelas, sigap, akurat, dan tidak (minim) menimbulkan kerugian. (Karman et al., 2021)

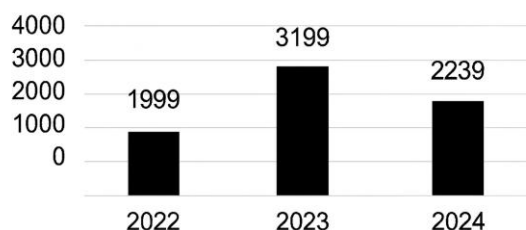
Penggunaan SPBE di Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Website resmi Kabupaten Cianjur, Website sendiri merupakan metode untuk menampilkan informasi di internet, berupa gambar, video, teks, suara, maupun interaktif yang menghubungkan (link) dari satu dokumen ke dokumen lainnya (hypertext) dan dapat diakses melalui browser (Mohamad Alviano, Yunita Trimarsiah, 2023). Website resmi Kabupaten Cianjur tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan warganya, tetapi juga sebagai platform untuk berbagai kebutuhan penting, seperti transparansi anggaran, promosi potensi desa, hingga pelayanan administrasi secara online.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Website di Kabupaten Cianjur seharusnya menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintahan daerah, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat distribusi informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Namun, implementasi website desa di Kabupaten Cianjur masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Interaksi antara pemerintah masyarakat belum berlangsung secara efektif dan efisien. Masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan dan informasi secara manual. Penurunan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan website dapat

dilihat dari data pengunjung yang cenderung fluktuatif. Di era digitalisasi, website seharusnya menjadi sarana utama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan efisiensi layanan publik.

Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Cianjur (2022-2024)



Gambar 1 Grafik Jumlah Pengunjung Website Desa di Kabupaten Cianjur (2022–2024)

Sumber: Hasil Observasi Data 2025

Data kunjungan halaman website Kabupaten Cianjur menunjukkan fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung mencapai 1.999 orang atau sekitar 25% dari total penduduk desa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 3.199 pengunjung (sekitar 40%), mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sistem informasi desa berbasis website. Namun, pada tahun 2024, jumlah pengunjung menurun menjadi 2.239 orang (sekitar 28%). Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Website kurang aktif dalam memberikan informasi atau tidak diperbarui secara berkala.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan teknologi informasi.
- Rendahnya pemahaman dan edukasi mengenai teknologi digital di kalangan masyarakat desa.

Pembahasan

Dalam rangka menilai efektivitas implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kabupaten, diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut (Jones, 1998) dalam (Agustino, 2008), terdapat tiga dimensi utama yang menjadi fokus implementasi, yaitu dimensi organisasi, dimensi interpretasi (pemahaman), dan dimensi aplikasi (penerapan). Ketiga dimensi ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menelaah sejauh mana kebijakan SPBE telah dijalankan secara optimal di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, ketiga dimensi tersebut menjadi landasan penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan website sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.

Dimensi Organisasi

Menurut Charles O. Jones, dimensi organisasi dalam implementasi kebijakan mencakup seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi tenaga pelaksana atau sumber daya manusia, dukungan anggaran atau sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana seperti perangkat teknologi, fasilitas, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat daerah, pengelola website, dan masyarakat di Kabupaten Cianjur, serta merujuk pada teori dimensi organisasi menurut Charles O. Jones, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah ini belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, di mana pengelolaan website kabupaten hanya dilakukan oleh satu orang yang

merangkap berbagai fungsi tanpa pelatihan teknis yang memadai. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas dan efektivitas pengelolaan informasi digital.

Selain itu, alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan website sangat minim, bahkan nyaris tidak tersedia, sehingga menghambat pelaksanaan pelatihan, pembaruan sistem, dan peningkatan kualitas layanan digital. Sarana pendukung seperti perangkat komputer yang sudah tidak layak pakai serta koneksi internet yang tidak stabil turut menjadi kendala yang signifikan dalam mendukung operasional website dan akses informasi bagi masyarakat.

Struktur organisasi pengelolaan website di Kabupaten Cianjur juga belum memenuhi standar ideal. Tidak terdapat pembagian tugas yang jelas, koordinasi antar unit kerja, maupun dukungan tim yang memadai, sehingga pengelolaan website menjadi rentan terhadap gangguan teknis dan menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun pengelola website telah ditunjuk secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) oleh pejabat daerah, penunjukan tersebut belum cukup menjamin keberhasilan tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM, dukungan anggaran yang memadai, serta perbaikan infrastruktur teknologi.

Untuk mewujudkan implementasi SPBE yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur, diperlukan penguatan organisasi melalui penambahan tenaga ahli yang kompeten, alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sistem digital, serta pembentukan struktur organisasi yang lebih formal dan terkoordinasi. Dengan demikian, pengelolaan website pemerintah daerah dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dimensi Interpretasi (Pemahaman)

Dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Charles O. Jones, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga para pelaksana memahami secara tepat apa yang harus dilakukan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cianjur, pemahaman para aparatur daerah terhadap tujuan dan fungsi website pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, seluruh pihak terkait menunjukkan kesadaran akan potensi website pemerintah sebagai media strategis untuk transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pejabat daerah dan pengelola website memahami pentingnya platform digital ini sebagai sarana komunikasi resmi. Namun demikian, masyarakat Kabupaten Cianjur masih menghadapi tantangan serius dalam hal literasi digital. Banyak warga belum terbiasa dengan teknologi informasi dan belum memahami cara mengakses serta memanfaatkan website pemerintah secara optimal. Bahkan, sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah daerah telah menyediakan website sebagai kanal layanan publik.

Kondisi ini menyebabkan tingkat pemanfaatan website pemerintah Kabupaten Cianjur masih rendah dan belum maksimal sebagai instrumen pelayanan dan komunikasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan SPBE, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital secara merata.

Dimensi Aplikasi (Penerapan)

Menurut Charles O. Jones, dimensi aplikasi dalam implementasi kebijakan menuntut agar seluruh proses operasional dijalankan secara lancar dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirancang dan disusun secara sistematis harus diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret di lapangan. Dalam konteks sistem informasi berbasis website di Kabupaten Cianjur, dimensi aplikasi mencakup penginputan data secara berkala dan akurat, pemeliharaan sistem

agar tetap berfungsi dengan baik, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan mudah diakses.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Jika sistem informasi digital di Kabupaten Cianjur dapat diterapkan secara efektif, maka manfaat kebijakan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, peneliti menyimpulkan bahwa pengelola website pemerintah daerah telah berupaya menjalankan tugasnya, namun pembaruan konten dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas. Pengelola menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Masyarakat yang telah mengetahui keberadaan website pemerintah mengaku terbantu dalam mengakses informasi dan layanan, namun sebagian besar warga masih belum memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan akses. Rendahnya literasi digital serta minimnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan website pemerintah Kabupaten Cianjur.

Hal-hal tersebut diatas tentunya menunjang relativitas antara prinsip-prinsip SPBE dengan prinsip-prinsip *good governance*, dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Masyarakat (Awaludin, 2019)

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cianjur mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan arah transformasi digital nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2024. Namun, pelaksanaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Dari sisi dimensi organisasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan sistem digital, serta kurangnya infrastruktur pendukung seperti perangkat keras dan koneksi internet yang stabil menjadi hambatan utama. Struktur kerja pengelolaan website belum terkoordinasi secara sistematis, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas operasional dan keberlanjutan layanan digital. Pada dimensi interpretasi, terdapat kesenjangan pemahaman antara aparatur pemerintah dan masyarakat terkait fungsi strategis SPBE. Meskipun aparatur menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya digitalisasi, literasi digital masyarakat desa masih rendah, sehingga pemanfaatan website pemerintah belum maksimal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan sebagian besar warga belum mengetahui atau belum mampu mengakses layanan publik berbasis elektronik. Sementara itu, dimensi aplikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis SPBE belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Pengelolaan konten website belum dilakukan secara berkala dan sistematis, serta belum ada mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan belum tercapainya tujuan utama SPBE sebagai instrumen pelayanan publik digital yang efektif. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas teknis aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan struktur organisasi pengelola SPBE, alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem dan infrastruktur, serta penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, SPBE dapat

menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan partisipatif di Kabupaten Cianjur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta; 2008.
2. Anggriani D, Islami S. Pengembangan layanan e-government di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19. *Ensiklopedia of Journal*. 2021;3(2):195–200. Available from: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1649>
3. Awaludin L. Strategi penguatan kompetensi SDM teknologi informasi & komunikasi (TIK) dalam mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2019;2(2):118–134. doi:10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115
4. Choirunnisa L, Hajar T, Oktaviana C, Ridlo AA, Rohmah EI, Sunan U, Surabaya A. Peran sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. 2023;3(1):71–95. Available from: <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/401>
5. Elektronik SPB. Perpres 95 SPBE. Jakarta: Sekretariat Negara; 2018.
6. Creswell JW. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2014.
7. Jones CO. *An Introduction to the Study of Public Policy*. 3rd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company; 1998.
8. Karman K, Deswanto R, Ningsih SA. Implementasi e-government pada pemerintah daerah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. 2021;2(2):43–50. doi:10.35326/jsip.v2i2.1525
9. Mohamad Alviano, Trimarsiah Y. Perancangan aplikasi penjualan berbasis web pada perusahaan dagang Dendis Production menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Informatika dan Komputer (JIK)*. 2023;14(1).
10. Moleong LJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2017.
11. Nazir M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia; 2013.
12. Zahra NSA, Suparman N, Alia S. Penerapan prinsip agile governance dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2022;3(5).
13. Rusdy RMIR, Flambonita S. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex LATA*. 2023;5(2):218–239. doi:10.28946/lexl.v5i2.2351
14. Sindiana, Rodiyah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa. *Jurnal Administrasi Publik*. 2023.
15. Subhan S, Sartika I. Tantangan dan strategi implementasi SPBE dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. 2025;7(6):4648–4656. doi:10.38035/rj.v7i6.1809
16. Syafaat F, Azhar R, Aminah S, Zakiyabarsih F. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi daerah: Studi kasus Disdukcapil Kabupaten Donggala. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)*. 2025;4(1):384–391. doi:10.70247/jumistik.v4i1.142
17. Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). [no date].
18. Kementerian PANRB. Penerapan SPBE Bermuara Pada Pelayanan Publik yang Efisien dan Efektif. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. 2024 Jul

16. Available from: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penerapan-spbe-bermuara-pada-pelayanan-publik-yang-efisien-dan-efektif>
19. Pratama A, Sari R. Evaluasi Implementasi SPBE di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*. 2023;11(1):55–67.
20. Wibowo A, Hartati S. Literasi Digital dan Partisipasi Masyarakat dalam SPBE: Studi Empiris di Jawa Barat. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*. 2024;6(2):102–115.